



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kukuh S. Achmad

Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2016

Pihak Pertama

Kukuh S. Achmad

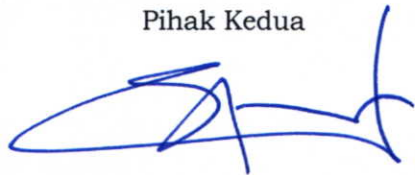
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder Perspectives		
1 Meningkatnya daya saing produk berstandar	1 Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri	7 %
Customer Perspectives		
2 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2 Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi	10500 Industri/ Organisasi
Internal Process Perspectives		
3 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3 Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	14% %
	4 Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI	60 %
	5 Jumlah LPK yang diakreditasi KAN	1496 LPK
	6 Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi	100 %
	7 Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	85 %
	8 Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi	3.5 skor
	9 Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK	1376 orang
	10 Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	9 skema
	11 Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional	18 skema

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran	12 Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	140 Kemampuan pengukuran
	13 Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi	9 Lembaga
Learning and Growth Perspectives		
5 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional	14 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yang meningkat kompetensinya	100 %
	15 Realisasi anggaran Deputi PSA	≥95 %
	16 Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola Deputi PSA	8 Aplikasi

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	11,061,654,000
2 Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	6,850,792,000
3 Peningkatan Penerapan Standar	9,431,498,000
Jumlah	<u>27,343,944,000</u>

Pihak Kedua



Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2016

Pihak Pertama



Kukuh S. Achmad



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Erawan
Jabatan : Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

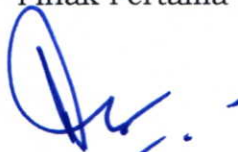
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Kukuh S. Achmad

Jakarta, Maret 2016

Pihak Pertama


Dede Erawan